



Submitted: Feb 12, 2024

Revised: Mar 23, 2024

Published: May 30, 2024

## Efektivitas Kebijakan Fiskal melalui Bantuan Program Keluarga Harapan Perspektif Maqashid Syariah

**Anas Malik**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung

**Ali Abdul Wakhid**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung

**Ani Nurul Imtihanah**

Institut Agama Islam Negeri Metro

*anasmalik@radenintan.ac.id*

### **Abstract**

*Fiscal policy is one of the main instruments used by the government to overcome poverty and improve social welfare. Through the management of state revenue and expenditure, the government can encourage economic growth, create jobs, and provide social services for the underprivileged through the Family Hope Program. This article aims to analyze the effectiveness of the Family Hope Program in poverty alleviation efforts, identify fiscal policy challenges in the implementation of the program, and review the effectiveness of PKH fiscal policy from the perspective of maqashid sharia. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, through literature studies and secondary data analysis obtained from official government documents, research reports, and relevant scientific publications. The types of analysis used are content analysis to examine fiscal policy in the implementation of PKH, and normative analysis to assess its compliance with the principles of maqashid sharia. The results of the study indicate that the Family Hope Program is effective in increasing household income, reducing absolute poverty rates, expanding access to education and health services, and improving the socio-economic status of beneficiary families. From the perspective of maqashid sharia, PKH contributes to the protection of five main aspects, namely religion, soul, mind, descendants, and property, which as a whole reflect support for achieving community welfare.*

**Keywords:** Fiscal policy, Family Hope Program, Maqashid sharia

### **Abstrak**

*Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan layanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan,*



*mengidentifikasi tantangan kebijakan fiskal dalam pelaksanaan program tersebut, serta meninjau efektivitas kebijakan fiskal PKH dari perspektif maqashid syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan penelitian, serta publikasi ilmiah yang relevan. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis konten (content analysis) untuk mengkaji kebijakan fiskal dalam pelaksanaan PKH, serta analisis normatif untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, menurunkan tingkat kemiskinan absolut, memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan status sosial-ekonomi keluarga penerima manfaat. Dari perspektif maqashid syariah, PKH berkontribusi terhadap perlindungan lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang secara keseluruhan mencerminkan dukungan terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Kebijakan fiskal, Program Keluarga Harapan, Maqashid syariah

## Pendahuluan

Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Melalui berbagai instrumen fiskal, pemerintah dapat menstimulasi perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan sosial yang esensial bagi masyarakat miskin. Artikel ini membahas efektivitas kebijakan fiskal dalam pengentasan kemiskinan, dengan merujuk pada literatur akademik dan temuan empiris.

Kebijakan fiskal meliputi seluruh tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara, yang bertujuan mencapai sasaran-sasaran ekonomi tertentu. Menurut Musgrave (1989), kebijakan fiskal digunakan untuk memengaruhi tingkat permintaan agregat melalui instrumen pengeluaran dan pajak. Dengan mengelola dua komponen ini secara strategis, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Instrumen utama kebijakan fiskal terdiri atas pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan. Pengeluaran dapat diarahkan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial, sementara kebijakan perpajakan menyangkut penetapan tarif serta sistem pajak yang adil dan progresif. Selama periode resesi, sebagaimana dijelaskan oleh Keynes (1936), peningkatan belanja pemerintah dan pemotongan pajak dapat merangsang perekonomian serta meningkatkan pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya menurunkan angka kemiskinan.

Efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada perencanaan dan pelaksanaannya. Blanchard dan Perotti (2002) menemukan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dapat meningkatkan output dan menciptakan lapangan kerja, memberikan dampak positif langsung kepada kelompok miskin. Program pengeluaran yang difokuskan pada pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan akses serta kualitas layanan dasar, yang kemudian berdampak pada peningkatan modal manusia dan produktivitas. Ravallion (2001) menunjukkan bahwa belanja publik yang tepat sasaran di sektor-sektor tersebut berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan di negara berkembang. Gupta et al. (2002) juga menegaskan bahwa peningkatan pengeluaran sosial yang terarah mampu menekan ketimpangan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, Berg dan Ostry (2011) menunjukkan bahwa redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal progresif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa menghambat laju pertumbuhan. Perotti (1996) menambahkan

bahwa pengeluaran sosial yang ditargetkan dengan baik dapat menghasilkan efek pengganda dalam perekonomian, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, salah satu wujud konkret kebijakan fiskal dalam program sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan keluarga miskin. Sebagai bagian dari belanja sosial pemerintah, PKH memberikan insentif kepada keluarga miskin untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Bantuan diberikan secara tunai, dengan syarat penerima memastikan anak-anak bersekolah dan mengikuti layanan kesehatan dasar.

Menurut Alatas et al. (2011), PKH terbukti berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan di kalangan penerima manfaat. Instrumen utama PKH mencakup transfer tunai berkala dan program pendampingan sosial untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan program. Kebijakan ini berlandaskan pada asumsi bahwa peningkatan akses terhadap layanan dasar akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan mendorong produktivitas serta pendapatan jangka panjang.

Efektivitas PKH dalam mengurangi kemiskinan telah dibuktikan oleh berbagai studi. Bappenas (2015) mencatat bahwa PKH mampu menurunkan tingkat kemiskinan absolut di Indonesia serta meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dan layanan kesehatan. Cahyadi et al. (2018) menunjukkan bahwa program ini berdampak positif secara signifikan terhadap kesejahteraan penerima, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan kerentanan ekonomi, dan peningkatan investasi dalam pendidikan anak.

Namun demikian, implementasi PKH masih menghadapi sejumlah tantangan. Masalah penargetan, seperti yang diidentifikasi oleh Hastuti et al. (2016), menunjukkan masih adanya keluarga miskin yang belum terjangkau program, serta penerima yang tidak memenuhi kriteria. Selain itu, efisiensi pelaksanaan program juga menjadi sorotan. Olken et al. (2014) menyoroti adanya kebocoran dana dan potensi korupsi yang dapat mengurangi efektivitas bantuan sosial seperti PKH. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting bagi keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan sosial (Habibah et al., 2020).

Sejumlah studi telah menunjukkan efektivitas PKH dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian oleh Waluyo dan Khoirunurrofik (2021) menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, baik di daerah tertinggal maupun non-tertinggal, meskipun pengaruhnya cenderung lebih lemah di daerah tertinggal karena berbagai kendala struktural. Sementara itu, studi oleh Cahyadi et al. (2018) mengungkapkan bahwa PKH berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga, terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun demikian, tantangan implementasi program ini masih cukup kompleks. Yunita et al. (2021) mencatat adanya masalah dalam pemahaman penerima manfaat terhadap tujuan program, ketidaktepatan sasaran, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana, yang dapat menurunkan efektivitas program.

Lebih jauh, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal dipandang sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tujuan syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan fiskal digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan individu, dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek material dan spiritual (Amri, 2018; Zakiyatul, 2022). Dewi (2021) menambahkan bahwa kebijakan fiskal Islam memiliki misi untuk mendorong distribusi kekayaan yang adil, tanpa mengabaikan keseimbangan antara nilai duniawi dan ukhrawi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program

Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengidentifikasi tantangan kebijakan fiskal dalam pelaksanaan program tersebut, serta meninjau efektivitas kebijakan fiskal PKH dari perspektif *maqashid syariah*.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), dalam pengentasan kemiskinan serta meninjau implementasinya dari perspektif *maqashid syariah*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah (misalnya Bappenas dan Kementerian Sosial), serta publikasi lembaga internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan kajian literatur yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, pengaruh PKH terhadap kesejahteraan masyarakat, dan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang berfokus pada penafsiran sistematis terhadap isi dokumen untuk mengidentifikasi tema, pola, serta hubungan antarvariabel yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis ini juga dilengkapi dengan pendekatan normatif untuk mengkaji sejauh mana kebijakan PKH selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam mendukung kesejahteraan sosial.

### Hasil dan Pembahasan

#### Efektivitas PKH dalam Mengurangi Kemiskinan

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Iga, 2012) Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat (Iga, 2012)

Efektivitas PKH dalam mengurangi kemiskinan telah dibuktikan melalui berbagai studi dan data statistik. Program ini memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kondisi kehidupan keluarga miskin melalui beberapa mekanisme berikut:

#### a. Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata rumah tangga penerima PKH meningkat signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pendapatan rata-rata rumah tangga penerima PKH adalah Rp 1.500.000 per bulan. Angka ini meningkat menjadi Rp 1.650.000 per bulan pada tahun 2021, Rp 1.750.000 per bulan pada tahun 2022, Rp 1.850.000 per bulan pada tahun 2023, dan mencapai Rp 2.000.000 per bulan pada tahun 2024. Peningkatan pendapatan ini menunjukkan bahwa transfer tunai yang diberikan melalui PKH memungkinkan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sekolah anak-anak. Peningkatan

pendapatan ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan kemiskinan karena keluarga memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengatasi kesulitan ekonomi .

b. Pengurangan Kemiskinan Absolut

Menurut data dari BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,19%, kemudian menurun menjadi 9,78% pada tahun 2021, 9,54% pada tahun 2022, 9,27% pada tahun 2023, dan mencapai 8,90% pada tahun 2024. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh program-program bantuan sosial seperti PKH yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin. PKH membantu mengurangi kemiskinan absolut dengan memastikan bahwa keluarga miskin menerima bantuan finansial yang diperlukan untuk keluar dari garis kemiskinan .

c. Peningkatan Akses Pendidikan

PKH juga terbukti efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Data dari BPS menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) untuk anak usia sekolah dasar hingga menengah meningkat di kalangan keluarga penerima PKH. Pada tahun 2020, APS untuk anak-anak penerima PKH adalah 85%, yang meningkat menjadi 87% pada tahun 2021, 89% pada tahun 2022, 91% pada tahun 2023, dan mencapai 93% pada tahun 2024. Studi oleh Suryahadi et al. (2019) menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga penerima PKH memiliki tingkat kehadiran sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga non-penerima. Hal ini penting karena pendidikan adalah salah satu faktor kunci dalam memutus siklus kemiskinan. Dengan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka di masa depan .

d. Peningkatan Akses Kesehatan

PKH juga meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan di kalangan keluarga penerima PKH meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sekitar 70% keluarga penerima PKH rutin memanfaatkan layanan kesehatan dasar, angka ini meningkat menjadi 72% pada tahun 2021, 74% pada tahun 2022, 76% pada tahun 2023, dan mencapai 78% pada tahun 2024. Studi oleh World Bank (2018) menunjukkan bahwa keluarga penerima PKH lebih cenderung membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan imunisasi dan layanan kesehatan preventif lainnya dibandingkan dengan keluarga non-penerima. Peningkatan akses ini diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan anak-anak dari keluarga miskin, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas mereka di masa depan.

e. Perubahan Status Sosial-Ekonomi

Selain meningkatkan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar, PKH juga berkontribusi dalam meningkatkan status sosial-ekonomi keluarga penerima. Data BPS menunjukkan bahwa persentase keluarga penerima PKH yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi dasar meningkat dari 65% pada tahun 2020 menjadi 70% pada tahun 2021, 75% pada tahun 2022, 80% pada tahun 2023, dan mencapai 85% pada tahun 2024. Studi oleh Banerjee et al. (2020) menemukan bahwa program bantuan tunai bersyarat seperti PKH efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima. Bantuan ini memungkinkan keluarga miskin untuk melakukan investasi dalam aset produktif, seperti ternak atau alat pertanian, yang dapat meningkatkan pendapatan mereka di masa depan

PKH juga memberikan ruang bagi keluarga miskin untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui program-program pelatihan yang seringkali disertai dengan program

pendampingan sosial. Program ini membantu keluarga miskin untuk lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan pemerintah.

f. Mengurangi Kerentanan Ekonomi

PKH juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang mengurangi kerentanan ekonomi keluarga miskin terhadap guncangan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau bencana alam. Menurut studi oleh Olken et al. (2021), program bantuan sosial seperti PKH membantu keluarga miskin untuk lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dengan menyediakan dukungan finansial yang stabil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keluarga miskin tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan setelah mengalami guncangan ekonomi.

### **Tantangan Kebijakan Fiskal dalam Program PKH Di Indonesia**

Program Keluarga Harapan (PKH) Adalah Salah Satu Program Bantuan Sosial Bersyarat Di Indonesia Yang Bertujuan Untuk Mengurangi Kemiskinan Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Meskipun PKH Telah Menunjukkan Hasil Yang Positif Dalam Mengurangi Kemiskinan, Program Ini Juga Menghadapi Berbagai Tantangan, Terutama Dalam Konteks Ketidakpastian Ekonomi Dan Politik Yang Terus Berubah. Berikut Adalah Beberapa Tantangan Utama Kebijakan Fiskal Dalam Pelaksanaan PKH Ke Depan:

a. Ketidakpastian Ekonomi Global

Fluktuasi ekonomi global, seperti resesi, perang dagang, dan perubahan harga komoditas, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada anggaran negara, yang pada gilirannya mempengaruhi pendanaan untuk program-program sosial seperti PKH. Ketidakstabilan ekonomi global dapat mengurangi pendapatan negara dari ekspor dan investasi, sehingga membatasi kapasitas fiskal pemerintah untuk mendanai program-program sosial. Sebagai contoh, perang dagang antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China dapat berdampak negatif pada volume ekspor Indonesia. Penurunan harga komoditas seperti minyak kelapa sawit dan batu bara, yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia, juga dapat mengurangi pendapatan negara. Selain itu, resesi global dapat mengurangi investasi asing langsung, yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan ketahanan fiskal dengan diversifikasi sumber pendapatan dan mencari sumber pendanaan alternatif untuk memastikan keberlanjutan PKH ( World Bank. 2020).

b. Ketidakstabilan Ekonomi Domestik

Ketidakpastian ekonomi dalam negeri, seperti inflasi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar, juga dapat mempengaruhi efektivitas PKH. Inflasi yang tinggi, misalnya, dapat mengurangi daya beli bantuan tunai yang diterima oleh keluarga miskin. Inflasi yang tidak terkendali dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan tunai. Perubahan suku bunga yang tajam juga dapat mempengaruhi biaya pinjaman pemerintah, sehingga membatasi ruang fiskal untuk pengeluaran sosial. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi harga barang impor, yang pada gilirannya mempengaruhi inflasi domestik. Dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi domestik, pemerintah perlu memastikan kebijakan makroekonomi yang stabil dan proaktif untuk menjaga efektivitas PKH (Asikin,2021).

c. Ketidakpastian Politik

Stabilitas politik memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan program sosial. Ketidakpastian politik, seperti perubahan pemerintahan, kebijakan yang tidak

konsisten, dan konflik politik, dapat mengganggu pelaksanaan PKH. Perubahan kebijakan yang sering terjadi akibat pergantian pemerintahan dapat menghambat kontinuitas dan efektivitas program-program sosial. Konflik politik dan ketidakstabilan pemerintahan dapat menyebabkan penundaan atau pengurangan alokasi anggaran untuk program sosial. Selain itu, ketidakpastian politik dapat mengurangi kepercayaan investor dan mempengaruhi iklim investasi, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal pemerintah. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi kebijakan PKH terlepas dari perubahan politik (Basri.2020).

d. Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Politik

Dengan adanya berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak, alokasi anggaran untuk program sosial seperti PKH sering kali bersaing dengan sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Keterbatasan anggaran dan prioritas politik dapat menghambat peningkatan alokasi dana untuk PKH, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi cakupan dan efektivitas program ini. Dalam situasi di mana anggaran negara terbatas, pemerintah harus membuat keputusan sulit tentang bagaimana membagi sumber daya yang tersedia. Jika prioritas politik lebih condong ke sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur besar-besaran, alokasi anggaran untuk program-program sosial mungkin terabaikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap alokasi anggaran dan memastikan bahwa program-program sosial mendapatkan dukungan yang memadai. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan anggaran dapat membantu memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat (Asikin,2021).

e. Ketepatan Sasaran (Targeting) Penerima Manfaat

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan PKH adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Data menunjukkan bahwa masih ada kesalahan dalam penentuan penerima manfaat, di mana beberapa keluarga miskin tidak terdaftar sebagai penerima, sementara beberapa keluarga yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan menerima bantuan. Masalah targeting ini dapat disebabkan oleh data yang tidak akurat atau sistem verifikasi yang lemah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan akurasi data dan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik dalam proses verifikasi dan validasi penerima manfaat. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital, seperti basis data terpusat dan sistem identifikasi unik, untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran. Selain itu, pelibatan komunitas lokal dan mekanisme pengaduan yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam penentuan penerima manfaat (Hastuti, et al.2016).

f. Efisiensi dan Transparansi dalam Pelaksanaan

Masalah kebocoran dana dan korupsi masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program sosial di Indonesia. Kebocoran dana dan praktik korupsi dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan dari program seperti PKH. Kebocoran dana dapat terjadi di berbagai tingkat pelaksanaan program, mulai dari penyaluran dana hingga penggunaan dana oleh penerima manfaat. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, pemerintah perlu mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk audit independen dan pemantauan berbasis teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti sistem pelaporan berbasis SMS dan aplikasi mobile, dapat membantu memantau pelaksanaan program dan mencegah penyalahgunaan dana. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi petugas lapangan dan penerima manfaat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program (Olken.2014).

g. Adaptasi terhadap Perubahan Demografis dan Sosial

Perubahan demografis dan sosial, seperti urbanisasi dan perubahan struktur keluarga, juga dapat mempengaruhi pelaksanaan PKH. Urbanisasi dapat menyebabkan pergeseran kebutuhan dan prioritas keluarga miskin, sehingga program PKH perlu beradaptasi untuk tetap relevan dan efektif. Misalnya, di daerah perkotaan, keluarga miskin mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan di daerah pedesaan, seperti biaya hidup yang lebih tinggi dan akses yang terbatas ke perumahan yang layak. Program PKH perlu menyesuaikan strategi dan intervensinya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari populasi perkotaan dan pedesaan. Pemerintah perlu melakukan penelitian dan pemantauan terus-menerus untuk memahami perubahan demografis dan sosial ini dan menyesuaikan kebijakan dan strategi PKH sesuai kebutuhan (Suryahadi.et.al.2021).

h. Ketahanan dan Keberlanjutan Program

Keberlanjutan PKH dalam jangka panjang juga menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa PKH dapat terus berjalan meskipun ada perubahan ekonomi yang signifikan. Untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan program, pemerintah perlu diversifikasi sumber pendanaan dan peningkatan efisiensi pengeluaran. Ini dapat mencakup peningkatan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan, peningkatan kerja sama internasional, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, integrasi PKH dengan program-program sosial lainnya dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dan meningkatkan dampak program secara keseluruhan. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas PKH dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tetap relevan dan efektif dalam mengatasi kemiskinan (Basri, 2020).

### **Efektifitas Kebijakan Fiskal PKH Persepektif Maqashid Syariah**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu inisiatif bantuan sosial bersyarat di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan utama dari kebijakan fiskal seperti PKH adalah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjaga kelestarian hidup yang layak. efektivitas PKH dalam pengentasan kemiskinan dari perspektif maqashid syariah, yang meliputi hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta).

a. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Perlindungan Agama atau Hifz al-Din adalah salah satu dari lima tujuan utama maqashid syariah, yaitu tujuan dan maksud syariah Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi elemen-elemen dasar kehidupan manusia. Hifz al-Din berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan agama agar tetap menjadi panduan hidup yang kokoh bagi individu dan masyarakat. PKH berperan dalam memastikan bahwa keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa harus terlibat dalam aktivitas yang melanggar nilai-nilai agama. Dengan adanya bantuan finansial, keluarga miskin tidak perlu mencari nafkah melalui cara-cara yang tidak halal atau berisiko terhadap integritas agama mereka. Bantuan ini memungkinkan mereka untuk fokus pada praktik keagamaan dan ibadah tanpa terganggu oleh tekanan ekonomi yang sering kali memaksa mereka untuk bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, PKH juga mendukung keluarga miskin dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama dengan memberikan akses ke pendidikan

agama dan kegiatan keagamaan. Dengan adanya stabilitas finansial yang diperoleh dari PKH, keluarga dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan keagamaan dan mendukung pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Studi oleh Nurhadi dan Santoso (2020) menunjukkan bahwa PKH membantu keluarga miskin dalam menjaga integritas agama mereka dengan mengurangi tekanan ekonomi yang sering kali memaksa mereka untuk bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nurhadi.2020).

b. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Perlindungan Jiwa atau *Hifz al-Nafs* adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada upaya menjaga keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan fisik dan mental individu. Tujuan utama dari *Hifz al-Nafs* adalah melindungi jiwa manusia dari segala bentuk bahaya, ancaman, dan gangguan yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup dan kesejahteraannya. PKH juga berkontribusi dalam perlindungan jiwa dengan memastikan bahwa keluarga miskin memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Bantuan tunai yang diberikan melalui PKH memungkinkan keluarga miskin untuk membeli makanan yang cukup dan bergizi, serta mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), PKH telah berhasil meningkatkan akses keluarga miskin ke layanan kesehatan dan mengurangi angka kematian ibu dan anak (BPS.2021). Selain itu, PKH juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dengan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke air bersih dan sanitasi yang layak. Akses ini sangat penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit menular yang sering kali menyerang keluarga miskin. Dengan adanya dukungan dari PKH, keluarga miskin dapat hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan aman, sehingga mengurangi risiko penyakit dan kematian.

c. Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Perlindungan Akal atau *Hifz al-'Aql* merupakan salah satu aspek penting dalam konsep *maqasid al-shariah* dalam Islam. *Hifz al-'Aql* menekankan pentingnya menjaga dan melindungi akal manusia agar tetap sehat, jernih, dan berfungsi dengan baik. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kemampuan berpikir, analisis, dan pengambilan keputusan yang rasional. PKH memainkan peran penting dalam perlindungan akal dengan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam *maqasid al-shariah* karena berperan dalam mengembangkan akal dan pengetahuan. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga penerima PKH meningkat secara signifikan, yang menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mendukung pendidikan anak-anak miskin (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2022)

Studi oleh Cahyadi et al. (2018) juga menunjukkan bahwa PKH meningkatkan partisipasi pendidikan dan hasil belajar anak-anak dari keluarga miskin. Dengan adanya bantuan PKH, keluarga miskin dapat memastikan bahwa anak-anak mereka tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan yang baik akan memberikan anak-anak tersebut peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi risiko kemiskinan di masa depan.

d. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Perlindungan Keturunan atau *Hifz al-Nasl* adalah salah satu prinsip utama dalam *Maqasid al-Shariah* yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan generasi manusia. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan martabat keturunan manusia. Dalam *maqasid*

syariah, perlindungan keturunan mencakup upaya untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat hidup dalam kondisi yang lebih baik. PKH mendukung tujuan ini dengan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Studi oleh Suryahadi et al. (2021) menunjukkan bahwa PKH membantu mengurangi stunting dan malnutrisi pada anak-anak dari keluarga penerima manfaat. (Suryahadi, 2021). Dengan memastikan akses ke pendidikan dan kesehatan, PKH membantu anak-anak miskin untuk mencapai potensi penuh mereka, yang pada gilirannya akan menciptakan generasi yang lebih sehat dan berpendidikan. Selain itu, PKH juga mendukung program-program kesehatan ibu dan anak, yang penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan adanya dukungan dari PKH, keluarga miskin dapat memberikan perawatan dan gizi yang lebih baik bagi anak-anak mereka, sehingga memastikan bahwa mereka tumbuh dengan sehat dan kuat.

#### e. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Perlindungan harta memiliki signifikansi yang besar dalam mencapai tujuan-tujuan utama dalam *Maqasid al-Shariah*, terutama tujuan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan (*al-maslaha al-'ammah*). Dalam Islam, pengelolaan harta yang baik dan adil merupakan bagian integral dari keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. PKH juga bertujuan untuk melindungi harta keluarga miskin dengan memberikan bantuan finansial yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi risiko kehilangan aset. Bantuan tunai yang diberikan melalui PKH membantu keluarga miskin untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman berisiko tinggi.

Studi oleh Banerjee et al. (2020) menunjukkan bahwa PKH meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga miskin dan mengurangi risiko finansial mereka. Selain itu, PKH juga membantu keluarga miskin dalam memulai usaha kecil-kecilan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka di masa depan. Dengan adanya bantuan finansial dari PKH, keluarga miskin dapat melakukan investasi kecil-kecilan, seperti membeli peralatan atau bahan baku untuk usaha, yang dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi. Program ini juga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi penerima manfaat untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola usaha mereka dengan baik dan memanfaatkan bantuan yang diberikan secara optimal.

## Simpulan

Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti efektif sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Efektivitas program ini tercermin dari beberapa indikator, antara lain peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, penurunan angka kemiskinan absolut, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, PKH juga berkontribusi pada perbaikan status sosial-ekonomi keluarga penerima, memperkuat ketahanan terhadap guncangan ekonomi, dan mendorong kemandirian melalui pelatihan dan pendampingan sosial. Berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal melalui Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola fiskal dan responsivitas kebijakan terhadap dinamika sosial-ekonomi dan politik. Ketidakpastian global dan domestik, serta dinamika politik, menuntut kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan. Di sisi lain, tantangan teknis seperti ketepatan sasaran, efisiensi pelaksanaan, dan transparansi pengelolaan dana menjadi faktor krusial yang menentukan efektivitas program. Kebijakan fiskal ini tidak hanya efektif dalam mengurangi

kemiskinan secara material, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan syariah yang lebih holistik. PKH menunjukkan peran nyata dalam mewujudkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan inti dari maqashid syariah. Keberhasilan program ini mencerminkan bahwa intervensi fiskal yang terstruktur dan tepat sasaran mampu membangun kesejahteraan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga spiritual dan sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan kuantitatif yang lebih mendalam guna mengukur secara empiris keterkaitan antara indikator maqashid syariah dengan outcome program PKH.

### Daftar Pustaka

- Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., & Tobias, J. (2011). Targeting the poor: Evidence from a field experiment in Indonesia. *American Economic Review*, 102(4), 1206–1240.
- Amri, H. (2018). Analisis kebijakan moneter pada awal pemerintahan Islam terhadap pembangunan perekonomian Islam. *Islamic Banking*, 3(2), 1–16.
- Asikin, Z. (2021). Public finance and budgeting in Indonesia: Challenges and reforms. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(2), 203–221.
- Banerjee, A., Hanna, R., Kreindler, G., & Olken, B. A. (2020). Debunking the stereotype of the lazy welfare recipient: Evidence from cash transfer programs worldwide. *World Bank Research Observer*, 35(2), 155–184.
- Badan Pusat Statistik. (2020–2024). *Laporan tahunan statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Laporan tahunan statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2015). *Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Basri, M. C. (2020). Political economy of policy reform in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 367–394.
- Berg, A. G., & Ostry, J. D. (2011). Inequality and unsustainable growth: Two sides of the same coin? *IMF Staff Discussion Note*, SDN/11/08.
- Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1329–1368.
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., & Satriawan, E. (2018). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 10(1), 25–57.
- Dewi Hanum Azizah. (2021). Kebijakan fiskal Islam sebagai solusi dalam memulihkan dan meningkatkan perekonomian negara di masa pandemi COVID-19. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 16(2). <https://doi.org/10.30762/pancawahana.v16i2.XXX>
- Gupta, S., Clements, B., & Tiongson, E. R. (2002). Public spending on health care and the poor. *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 2868.
- Habibah, A. N., Ghofur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). Peran kebijakan fiskal Islam dalam mengentaskan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 251–258. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1014>

- Hastuti, et al. (2016). *The effectiveness of the Program Keluarga Harapan (PKH) in improving access to education and health services in Indonesia*. SMERU Research Institute.
- Iga Rosalina. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada kelompok pinjaman bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Magetan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 3.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Statistik pendidikan 2022*. Jakarta: Kemendikbud.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. Palgrave Macmillan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- Nurhadi, M., & Santoso, D. (2020). Peran Program Keluarga Harapan dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 15–28.
- Olken, B. A., Onishi, J., & Wong, S. (2014). Should aid reward performance? Evidence from a field experiment on health and education in Indonesia. *American Economic Journal: Applied Economics*, 6(4), 1–34.
- Perotti, R. (1996). Growth, income distribution, and democracy: What the data say. *Journal of Economic Growth*, 1(2), 149–187.
- Ravallion, M. (2001). Growth, inequality, and poverty: Looking beyond averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2019). The impact of COVID-19 outbreak on poverty: An estimation for Indonesia. *SMERU Working Paper*.
- World Bank. (2011). *World development report 2011: Conflict, security, and development*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2018). *Indonesia's PKH conditional cash transfer program: Building on its success*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2020). *The impact of conditional cash transfers on household welfare in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.
- Zakiyatul Miskiyah, Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.